

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

DITERIMA

Januari 2024

DIREVISI

Februari 2024

DISETUJUI

Maret 2024

Rizky Nanda*, Moh. Khusaini

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: Humans are any region's main source of development. Therefore, improvement on their quality, which is measured through Human Development Index (HDI), is necessary. Cities and regencies in Papua city are high in discrepancy concerning the said index. Therefore, the roles of the government as the policy makers are crucial. The objective of this research is to identify the effects of local own-source revenue and special autonomy funds on HDI with capital expenditures as the moderating variable. This research uses secondary data from 29 regencies and cities in Papua province, from 2017 to 2021 and was analyzed through panel data regression with interaction. The hypothesis testing and the model feasibility assessment were conducted using *t*-test, *F*-test, and coefficient of determination test. This study finds that local own-source revenue, special autonomy funds, and capital expenditures negatively and significantly influence HDI. Furthermore, capital expenditures as the moderating variable were found to strengthen the partial effects of local own-source revenue and special autonomy funds to HDI. Finally, this research is expected to serve as evaluation material and reference for the government in its policy-making processes and to enrich the treasury of knowledge in financial literacy.

Keywords: Human Development Index; Local own-source revenue; Special autonomy funds; Capital expenditure

Abstrak: Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketimpangan kondisi pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Papua yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua selama lima tahun (2017-2021). Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan struktur moderasi dengan interaksi. Pengujian hipotesis dan kelayakan model dilakukan melalui Uji T, Uji F dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DOK, dan BM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Kemudian, keberadaan BM sebagai variabel moderating terbukti mampu memperkuat hubungan PAD dan DOK terhadap IPM secara parsial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah dalam proses pengambil kebijakan. Serta diharapkan menjadi tambahan pustaka pengetahuan bagi dibidang literasi keuangan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Asli Daerah; Dana Otonomi Khusus; Belanja Modal.

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

RIZKY NANDA

Rizkyn17_@student.ub.ac.id

Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya,
Indonesia**Cite this as:**

Nanda, R & Khusaini, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel *Moderating*. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 03, Number 2, Pages 427-437. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.8>

PENDAHULUAN

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan suatu daerah melalui pendekatan aspek sosial yaitu terciptanya kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan (Ariansyah, 2017). Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan terbentuknya negara di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 (UUD'45). SDGs merupakan program global berupa pembangunan berkelanjutan dengan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan program tersebut, dan sebagai bagian dari PBB, Indonesia juga berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut melalui Media Nasional 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melihat pentingnya peran manusia, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut BPS (2022), Papua merupakan provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, dengan nilai 60,62 (kategori sedang) pada tahun 2021. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya ketimpangan antar kabupaten/kota, dari 29 kabupaten/kota terdapat 16 kabupaten/kota dalam kategori IPM sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dirasakan oleh sebagian kecil wilayah saja. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan desentralisasi fiskal, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk sektor publik (pendidikan dan kesehatan). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berpotensi meningkatkan IPM. Menurut Suarjana et al., (2018) semakin besar PAD yang dapat dipungut oleh daerah, menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai cukup anggaran untuk dibelanjakan pada pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Begitu pula dengan DOK, dengan alokasi yang terfokus

pada pembiayaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hal ini akan berdampak pada pembangunan manusia yang lebih baik. Belanja modal berperan sebagai variabel moderating. Hal ini didasarkan pada peranan belanja modal sebagai bagian dari belanja langsung, yang dalam pengertiannya adalah belanja yang digunakan pemerintah dalam membiayai program dan kegiatan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan dan fasilitas umum (Khusaini, 2018)

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu Seperti penelitian oleh (Nurlina & Syafira, 2019) menunjukkan bahwa DOK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian (Isnadi & Fikriah, 2019) yang menunjukkan bahwa DOK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Kota Aceh. Berdasarkan masalah yang telah disampaikan, disertai dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Moderating.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi bagi akademik dan berbagai pihak yang membutuhkan terkhusus dibidang literasi keuangan. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi tambahan bagi pengambil kebijakan dan lembaga yang membutuhkan dalam suatu pembuatan keputusan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DOK secara parsial terhadap IPM, serta mengetahui peran Belanja Modal sebagai variabel moderating dalam memperkuat atau memperlemah hubungan PAD dan DOK secara parsial terhadap IPM.

KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (OECD, 2019). Pada dasarnya,

adanya desentralisasi dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar tingkat pemerintahan, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karenanya, hakikat desentralisasi adalah “*Closer Government to People*”. Dalam implementasinya, secara garis besar konsep desentralisasi terdiri atas tiga bentuk, yaitu desentralisasi politik (*political decentralisation*), desentralisasi administrasi (*administration decentralisation*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralisation*) (OECD, 2019).

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibidang keuangan. Desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Jumadi et al., (2013) bahwasanya dengan desentralisasi fiskal akan memaksimalkan pelayanan publik dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi prioritas daerah dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. Implikasinya adalah hal tersebut akan meningkatkan efisiensi alokasi ekonomi pemerintah daerah, dan yang lebih penting akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Lighthart & Van Oudheusden, 2015) sehingga akan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dengan rakyatnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya, dengan catatan tetap berada pada pengawasan dari pemerintah pusat.

Konsep Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, diperlukan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta standar hidup layak yang lebih tinggi (HDR, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh kemudahan dan peningkatan kualitas akses pendidikan, peningkatan kompetensi dibidang

literasi, serta peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.

Peran penting manusia sebagai agen dari pembangunan suatu bangsa, turut disampaikan oleh Adam Smith, yang menyatakan bahwa tingkat kemakmuran pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan manusia selaku faktor produksi. (Wijayanto et al., 2015) menyatakan bahwa terdapat dua sisi yang perlu dipertimbangkan dalam konsep pembangunan manusia. Pertama, sisi informasi kapabilitas manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Kedua, sisi penggunaan kapabilitas tersebut dalam kegiatan yang produktif. Apabila kedua sisi tersebut terpenuhi, maka kualitas dan kesejahteraan akan tercapai.

Dengan berpedoman pada ketentuan dari UNDP, BPS menggunakan pengukuran dari tiga dimensi dasar IPM yaitu: (1) panjang umur dan sehat; diukur dengan angka harapan hidup; (2) pengetahuan, diukur dengan angka harapan lama sekolah; dan (3) standar hidup layak, diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Hubungan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

APBD pada dasarnya terdiri atas tiga pos utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. PP No. 12 tahun 2019 menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan, belanja daerah merupakan pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam pelaksanaannya, APBD didasarkan pada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut mengatur bagaimana pendapatan daerah digunakan. Fungsi alokasi dimaksudkan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan, fungsi distribusi lebih melihat bahwa kebijakan anggaran harus didasarkan pada keadilan. Fungsi distribusi merupakan bentuk pelaksanaan peran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa belanja daerah merupakan bentuk dari pelaksanaan

fungsi alokasi dan distribusi melalui penggunaan pendapatan daerah untuk membiayai program-program pemerintah (Khusaini, 2018).

Hukum Wagner (*Wagner's Law*) atau dikenal juga dengan '*The Law of Increasing State Activity*' menjelaskan hubungan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Adolf Wagner menyatakan bahwa aktivitas pemerintah yang semakin meningkat didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah pertumbuhan pendapatan riil yang akan meningkatkan kegiatan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (Iranoust, 2019). Ini menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan. Friedman dengan hipotesisnya, '*The Tax-and-Spend Hypothesis*', menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini kaitannya dengan pajak, memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan teori Adolf Wagner dan hipotesis Friedman, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan belanja daerah untuk membiayai aktivitas pemerintah. Terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian (Rizal & Erpita, 2019) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya daerah itu sendiri, termasuk masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak dan retribusi daerah. Tujuan dari pengenaan pajak dan retribusi daerah adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. PAD memiliki peran penting dalam pembiayaan daerah, hal tersebut karena sebagian besar pembangunan daerah berasal dari PAD (Hobrouw et al., 2021).

Berdasarkan PP No. 12 tahun 2019, PAD terdiri dari empat sumber pendapatan, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Sebagai sumber pendapatan utama daerah,

PAD berperan dalam pelaksanaan urusan pemerintah melalui belanja daerah, sehingga berdampak pada perkembangan kualitas pembangunan manusia (Suarjana & Murni, 2018). Selaras dengan hal tersebut, (Suarjana & Murni, 2018) dan (Qisthina et al., 2019) juga menyatakan bahwa PAD berhubungan dengan IPM, peningkatan PAD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup anggaran untuk melakukan belanja pada pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Adanya peningkatan PAD untuk memenuhi kebutuhan dasar publik, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hubungan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengetahuan (knowledge) serta umur panjang dan sehat (long healthy life) merupakan bagian dari dimensi penilaian IPM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya kedua dimensi tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan bentuk perlakuan khusus dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi khusus, salah satunya Papua. Menurut PMK No. 76/PMK.07/2022, Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah mengalokasikan pada bidang yang berbeda-beda, tergantung pada bidang yang menjadi prioritas.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2021, DOK berasal dari 2,5% Dana Alokasi Umum (DAU) nasional yang difokuskan pada program pendidikan dan kesehatan. Melihat fokus alokasi DOK pada bidang yang terkait dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia, maka keberadaan DOK akan mendukung peningkatan IPM dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan (Cabui & Fangohoy, 2020) yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran penduduk merupakan tujuan utama dari adanya otonomi khusus.

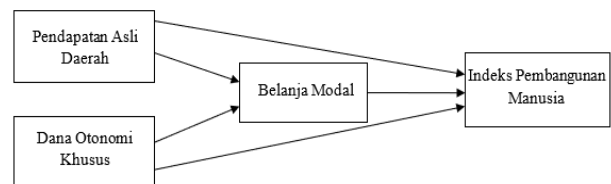
Hubungan Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam alokasi anggaran, belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui berbagai program layanan publik (Khusaini, 2018). Dengan adanya layanan publik, akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh fasilitas pendidikan, kesehatan, dan melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga pengetahuan, umurpanjang dan sehat, serta standar hidup layak yang merupakan dimensi dalam IPM dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Oleh karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan dasar, termasuk pelayanan publik.

Sebagai bagian dari belanja langsung, belanja modal memiliki peran penting untuk mewujudkan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik. Menurut PP No. 12 tahun 2019, belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan begitu, belanja modal dapat pula dimaknai sebagai alokasi anggaran yang secara langsung

dapat dirasakan masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Alokasi belanja modal pada pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia secara fisik dan non fisik, serta mewujudkan kesejahteraan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hunian yang memadai (Arifin et al., 2020). Kemudian (Hukom, 2015) juga menyatakan bahwa realisasi belanja modal pada pelayanan publik merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian oleh (Setiawan & Budiana, 2015) menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, kerangka piker, serta penelitian-penelitian terdahulu, maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

- H1: Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H2: Dana Otonomi Khusus diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H3: Belanja Modal diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H4: Belanja Modal mampu memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H5: Belanja Modal mampu memoderasi hubungan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan berupa data panel, yang diambil dari 29 kabupaten/kota Provinsi Papua dengan jangka waktu lima tahun (2017-2021). Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan struktur moderasi dengan interaksi (Ekananda, 2014). Sehingga model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan variabel independen berupa PAD dan DOK, variabel moderasi berupa BM, dan variabel dependen berupa IPM.

Terdapat beberapa tahapan uji model yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Uji Pemilihan Model (menentukan model terbaik yang digunakan pada penelitian), Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas), dan Uji Kelayakan Model (Uji F, Uji T, dan Koefisien Determinasi). Berikut merupakan model regresi yang digunakan.

$$IPMit = \alpha + \beta1LnPADit + \beta2LnDOKit + \beta3LnDOKit + \beta4LnPAD*BMit + \beta5LnDOK*BMit + \epsilon_i$$

Keterangan :

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DOK = Dana Otonomi Khusus
- BM = Belanja Modal
- PAD*BM = Perkalian PAD dan BM sebagai interaksi
- DOK*BM = Perkalian DOK dan BM sebagai interaksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model perlu dilakukan pada jenis data berupa data panel, dengan maksud untuk menentukan model terbaik yang digunakan pada penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq . d.f	Prob
Chow	749.739782	28	0.0000
Hausman	66.180221	5	0.0000

Sumber: Pengolahan Data Primer (2023)

Dari hasil uji pemilihan model tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hal ini diketahui dari hasil Uji Chow dan Uji

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DOK	BM	PAD*BM	DOK*BM
PAD	1.000000	-0.210171	0.161995	0.769138	-0.020905
DOK	-0.210171	1.000000	0.171381	-0.075630	0.717822
BM	0.161995	0.171381	1.000000	0.586805	0.758474
PAD*BM	0.769138	-0.075630	0.586805	1.000000	0.317032
DOK*BM	-0.020905	0.71782	0.758474	0.317032	1.000000

Sumber: Pengolahan Data Sekunder (2023)

Uji Multikolinearitas dilakukan menggunakan pendekatan analisis matriks.

Hausman, yang mana nilai Probability 0.0000 (<0.05)

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probability	Keterangan
PAD	0.6465	Homoskedast isitas
DOK	0.6842	Homoskedast isitas
BM	0.2783	Homoskedast isitas
PAD*BM	0.2187	Homoskedast isitas
DOK*BM	0.5547	Homoskedast isitas

Sumber: Pengolahan Data Primer (2023)

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui Uji Glesjer. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai probability setiap variabel adalah >0.05, artinya pada model penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau berada pada kondisi homoskedastisitas.

Dengan ketentuan bahwa dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai korelasi

antar variabel bebas adalah <0.09 (Gujarati,2013). Berdasarkan hasil uji tersebut, diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel adalah <0.09, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model yang digunakan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Estimasi Data

Variabel	Hasil
C	5914.985
PAD	-0.145835 (0.0036)
DOK	-0.004191 (0.0359)
BM	-0.010598 (0.0000)
PAD*BM	5.781766 (0.0004)
DOK*BM	0.001795 (0.0188)
Adjusted R-Squared	0.996720
Prob(F-Statistic)	0.000000

Sumber: Pengolahan Data Sekunder (2023)

Berdasarkan hasil estimasi data tersebut didapatkan model regresi penelitian sebagai berikut.

$$IPMit = 5914.985 - 0145835 PADit - 0.004191 DOKit - 0.010598 BMit + 5.781766 PAD*BMit + 0.001795 DOK*BM + e$$

Hasil Uji F (kelayakan model) yang ditunjukkan oleh nilai Prob(F-Statistic) adalah 0.000000 (<0.05). Hal tersebut berarti bahwa model atau persamaan regresi layak untuk digunakan pada penelitian. Kemudian terkait dengan seberapa baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, hasil estimasi data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Adjusted R-squared adalah

0.995727. Dengan hasil yang demikian, maka diketahui bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99.57%, sedangkan sebesar 0.43% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen dengan sangat baik.

Hubungan antar PAD terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi data diketahui bahwa PAD memiliki hubungan signifikan negatif terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0.0036 (<0.05) dan koefisien -0.145835. Artinya, adanya peningkatan PAD sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0.15%, dan begitupula sebaliknya.

Belum mandirinya keuangan daerah menjadi salah satu alasan terjadinya hubungan yang signifikan negatif tersebut. Menurut Hobrouw et al., (2021) semakin mandiri suatu daerah, maka PAD terbukti mampu membiayai pembangunan daerahnya, termasuk didalamnya terkait dengan pembangunan manusia. Berdasarkan data terkait sumber penerimaan daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di kabupaten/kota Provinsi Papua, dalam kurun waktu 2017-2021, rata-rata sumber penerimaan daerah tertinggi adalah berasal dari Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) yaitu 90.11%, Pendapatan Lainnya sebesar 7.10%, dan PAD sebesar 3.09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah masih memiliki ketergantungan transfer oleh pemerintah pusat, dan PAD memiliki peranan paling sedikit dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Ketergantungan yang masih tinggi atau kemandirian yang sangat rendah itulah yang kemudian menjadi penyebab kurang maksimalnya PAD dalam memberikan dampak yang positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Zainuddin et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kenaikan PAD yang terjadi di Banda Aceh tidak mampu meningkatkan dan mencerminkan kemakmuran rakyat.

Hubungan DOK terhadap IPM

Hasil estimasi data menunjukkan bahwa DOK memiliki hubungan signifikan negatif

terhadap IPM. Adanya peningkatan DOK sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0.004191, dan begitupula sebaliknya. Dengan hubungan yang demikian menunjukkan bahwa DOK belum secara maksimal dialokasikan berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2021, yaitu untuk pembiayaan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan kajian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pengelolaan DOK di Provinsi Papua, menunjukkan beberapa hal yang kemudian menjadi penghambat bagi DOK untuk mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pertama, banyaknya permasalahan terkait pengelolaan DOK yang belum terselesaikan, hal ini ditunjukkan dengan dari 1.500 rekomendasi yang diberikan BPK terkait pengelolaan DOK, hanya 527 (35%) yang baru ditindaklanjuti.

Kedua, permasalahan regulasi, peraturan yang ada belum secara lengkap mengatur pengelolaan DOK yang tepat, seperti penggunaan *grand design* dalam proses perencanaan dan sebagai acuan kerja. Ketiga, masalah kelembagaan. Hal ini terkait dengan peran dan fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP). Hasil kajian BPK menyampaikan bahwa MRP belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan, yang mana MRP belum menerima laporan terkait dengan realisasi DOK pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Inilah yang kemudian menjadi pengambat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja pada tahun anggaran selanjutnya.

Keempat dan terakhir adalah sumber daya manusia. sumber daya manusia yang ada belum secara maksimal dan optimal dalam mengalokasikan DOK pada program-program yang diprioritaskan. Terutama dalam hal pendidikan, yang mana alokasi hanya berfokus pada pemberian beasiswa tanpa adanya pelatihan keterampilan pelajar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing yang juga merupakan tujuan dari program otonomi khusus. Menurut Wheelan (2019) kurangnya keterampilan yang dimiliki individu, menjadi penghambat bagi mereka untuk meningkatkan daya saing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Wheelan juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan modal manusia, tidak

hanya cukup dengan mengikuti pembelajaran di kelas, melainkan perlu adanya ketekunan dan kreatifitas. Sehingga alokasi DOK dibidang pendidikan tanpa adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan inilah yang kemungkinan berdampak pada penurunan IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Adanya beberapa permasalahan itulah yang kemudian menjadi hal yang melatarbelakangi hubungan yang signifikan negatif antara DOK terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnadi & Fikriah (2019) dan Arispren et al., (2021).

Hubungan BM terhadap IPM

Sama halnya dengan PAD dan DOK, hasil penelitian menunjukkan bahwa BM memiliki hubungan signifikan negatif terhadap IPM. Adanya peningkatan BM sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan IPM sebesar 0.10%, dan begitupula sebaliknya.

Menurut Pradnyantari & Dwirandra, (2017), alokasi belanja daerah berupa belanja modal yang belum maksimal akan berdampak pada pencapaian tingkat kualitas pembangunan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran belanja modal sebagai bagian dari belanja langsung, yang mana belanja langsung ini dipahami sebagai belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan berbagai program layanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Artinya, semakin besar alokasi belanja langsung, termasuk belanja modal, maka akan semakin besar pula anggaran yang dirasakan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahterannya (Khusaini, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, menunjukkan rata-rata realisasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua masih didominasi oleh belanja tidak langsung (>50%), sedangkan belanja langsung belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Inilah kemudian yang menjadi penghambat bagi belanja modal, sebagai bagian dari belanja langsung, untuk meningkatkan pembangunan manusia melalui penyediaan berbagai pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oluwatobi & Ogunrinola (2011) dan Pradnyantari & Dwirandra, (2017) yang

menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif antara belanja modal terhadap IPM

Pengaruh Variabel Moderating

Berdasarkan hasil estimasi data terkait pengaruh variabel moderating dengan interaksi, menunjukkan bahwa variabel PAD*BM dan DOK*BM terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi, yaitu Belanja Modal (BM) terbukti mampu memperkuat hubungan PAD dan DOK secara parsial terhadap IPM. Dimana adanya peningkatan BM sebesar 1% akan memperkuat hubungan PAD terhadap IPM sebesar 57.81%, dan adanya peningkatan BM sebesar 1% akan memperkuat hubungan DOK terhadap IPM sebesar 0.001795, begitupula sebaliknya.

Keberadaan belanja modal sebagai variabel moderating yang memperkuat hubungan atau pengaruh PAD terhadap IPM dapat dijelaskan melalui fungsi dari belanja modal itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya sebagai bagian dari belanja langsung, semakin besar alokasi belanja modal maka akan semakin besar pula anggaran yang dirasakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka dengan semakin besar alokasi PAD dan DOK terhadap BM, maka akan meningkatkan kemampuan belanja modal dalam menyediakan berbagai layanan dasar, berupa peningkatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan yang mana merupakan bagian dari dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal tersebut juga sejalan dengan Hukum Wagner oleh Adolf Wagner, yaitu 'The Increasing State Activity' yang 48 menyatakan bahwa terdapat tiga (3) alasan utama yang mengakibatkan peningkatan aktivitas oleh pemerintah, antara lain: (1) Adanya peningkatan populasi masyarakat yang semakin kompleks, sehingga mengharuskan pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan publik; (2) Pertumbuhan pendapatan pemerintah yang kemudian memperluas kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat; dan (3) Adanya pembangunan ekonomi dan perubahan teknologi yang mengharuskan keterlibatan pemerintah didalamnya. Dengan berdasarkan pada alasan kedua, maka diketahui bahwa dengan semakin meningkatnya BM, dengan alokasi PAD dan

DOK didalamnya, maka akan meningkatkan kemampuan PAD dalam menyediakan berbagai layanan publik untuk menciptakan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik. Inilah yang kemudian menjadi alasan, keberadaan Belanja Modal sebagai variabel moderating mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan PAD dan DOK terhadap IPM secara parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandri et al., (2016) dimana belanja modal sebagai variabel moderating terbukti mampu memoderasi hubungan pajak daerah, sebagai bagian dari PAD, terhadap IPM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini dimana bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengaruh variabel moderasi berupa Belanja Modal (BM) dalam mempengaruhi hubungan keduanya, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, variabel PAD dan DOK secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan arah hubungan yang negatif. Artinya, adanya kenaikan pada PAD dan DOK secara parsial akan berdampak pada penurunan IPM. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran PAD dalam membiayai pembangunan daerah dan kurang optimalnya pengelolaan DOK untuk mencapai tujuan otonomi khusus. Kedua, BM sebagai variabel moderasi terbukti mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan PAD dan DOK terhadap IPM. Hal ini tidak terlepas dari peran BM sebagai belanja daerah dan belanja langsung yang menjembatani pendapatan daerah (PAD dan DOK) dalam melakukan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (IPM).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak terkait. Pertama, masih tingginya ketergantungan akan transfer oleh pemerintah

pusat menjadi penghambat bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam mencapai kemandirian, sehingga PAD belum maksimal dalam memberikan kontribusinya untuk pembangunan daerah (IPM). Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu untuk menggali sumber-sumber ekonomi baru di daerahnya untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap IPM. Kedua, perlu adanya tidak lanjut dari pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait permasalahan pengelolaan DOK di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sehingga DOK dapat dengan optimal mencapai tujuan otonomi khusus, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terkait dengan peran BM sebagai variabel moderasi, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penambahan porsi BM sebagai bagian dari belanja langsung untuk meningkatkan anggaran yang dirasakan oleh masyarakat guna mencapai IPM yang lebih baik. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya, dalam hal menyempurnakan penelitian yang sudah ada, maka dapat menggunakan data penelitian yang lebih banyak dan variatif agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Seperti penggunaan variabel yang secara langsung lebih berdampak terhadap IPM, seperti belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, S. (2018). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283.
- Arifin, Z., Maipita, I., & Hutasuhut, S. (2020). the Effect of Capital Expenditure and Economic Growth on the Human Development Index of the District City in North Sumatera. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(1), 585–594. <https://doi.org/10.14738/assrj.71.7741>
- Arispen, A., Rahmi, D., & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia. Diakses pada Rabu, 9 November 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Cabui, E. M., & Fangohoy, A. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Musamus Journal of Economics Development*, 3(1), 35–43. <https://doi.org/10.35724/feb.v3i1.3793>
- Charles, Wheelan. (2019). *Naked Economics : Undressing the Dismal Science*. New York: W.W. Norton & Company
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). The Influence of Local Own Income, Capital Expenditures and Human Development Index. *E-Journal Akuntansi Universitas Cenderawasih*, 31(2), 401–413.
- Hukom, A. (2015). Effect Of Capital Expenditures, Economic Growth And Poverty On Human Development In Central Kalimantan. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 6(6), 19–27. <https://doi.org/10.9790/5933-06641927>
- Irandoost, M. (2019). Wagner on government spending and national income: A new look at an old relationship. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 636–646. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.003>
- Isnadi, N., & Fikriah. (2019). *Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh* (Vol. 4, Issue 1).
- Jumadi, Pudjiharjo, M., Maski, G., & Khusaini, M. (2013). The impact of fiscal decentralisation on local economic development in Serbia. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 13(1), 1–7. [https://doi.org/10.4335/18.1.143-163\(2020\)](https://doi.org/10.4335/18.1.143-163(2020))
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. Malang : UB Press Khusaini, M (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press
- Ligthart, J. E., & Van Oudheusden, P. (2015). In government we trust: The role of fiscal decentralization. *European Journal of Political Economy*, 37, 116–128. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.11.005>

- Nurlina, & Syafira, S. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 126–138. <https://doi.org/10.35724/feb.v3i1.3793>
- OECD (2019), Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris. <https://dx.doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>
- Oluwatobi, S. O., & Ogundinola, O. I. (2011). Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*, 4(3), 72–80. <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n3p72>
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. . (2017). 27313-1-57912-1-10-20170417 (1). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 536–564.
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). *Qisthina et al., 2019.pdf* (pp. 47–51).
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/2453>
- Sandri, N. K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Dwirandra, A. A. N. . (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 71–81.
- Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(10), 1276–1303.
- Suarjana, A. A. G. M., & Murni, N. G. N. S. (2018). Effect of Local Original Revenue and Economic Growth to Human Development Index of Regencies/Cities in Bali Province. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(3), 280–289. <https://doi.org/10.31940/soshum.v8i3.1144>
- UNDP (United Nations Development Programme). 2020. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>
- Wijayanto, A., Khusaini, M., Syafitri, W., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Brawijaya, U. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Pdrb Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur) The Analysis Of Health And Educational Expenditure As Well As Pdrb Per Capita's Influence On Human Development Index (Study of Cities/Regencies at East Java Province). In *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* (Vol. 1, Issue 2).
- Zainuddin, Maryam, Hamdiah, C., Bakri, M., & Surya, J. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 10(3), 207–216. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/3267>